

EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN
MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

MUHAMMAD REZA KHAIRULLAH

(e-mail : rezakhairullah@gmail.com)

Pembimbing: Zulkarnaini, S.Sos, M.S.i

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

MUHAMMAD REZA KHAIRULLAH. 1201135099. Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Kampar. Dibimbing oleh Zulkarnaini,S.Sos. M.Si.

Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Kampar dalam dalam 3 tahun terakhir belum berjalan dengan efektif. Ketersediaan tenaga pengajar dan partisipasi masyarakat terhadap Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji merupakan salah satu penyebab belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. Tujuan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji mengaktifkan umat Islam mempelajari dan membaca Al-Quran di waktu maghrib dan menjadikan masyarakat yang agamis dan membiasakan diri membaca Al-Qur'an dan memiliki karakter keagamaan yang kuat di Kabupaten Kampar.

Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 yang mengenai tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji dikategorikan belum berhasil. Hal ini terlihat dari tidak tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan dari Perda Nomor 2 tahun 2013. Seperti mengaktifkan umat Islam mempelajari dan membaca Al-Quran di waktu maghrib dan menjadikan masyarakat yang agamis dan membiasakan diri membaca Al-Quran dan memiliki karakter agama yang kuat di Kabupaten Kampar. Ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan, yaitu: faktor ketersediaan tenaga pengajar dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Evaluasi, Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji

***EVALUATION OF REGIONAL REGULATION NO. 2 OF 2013 ON THE COMMUNITY
MOVEMENT MAGHRIB QUR'AN IN KAMPAR REGENCY.***

MUHAMMAD REZA KHAIRULLAH

(e-mail : rezakhairullah@gmail.com)

Supervised by Zulkarnaini, Sos. M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Peoples Movement Maghrib Qur'an in Kampar regency in the last 3 years has not been effective. The availability of teaching staff and public participation in the Community Movement Maghrib Qur'an is one of the causes of the ineffectiveness of the implementation of the Regional Regulation No. 2 of 2013 on the Community Movement Maghrib Qur'an. Interest Regional Regulation No. 2 of 2013 on the Community Movement Maghrib enable Muslims learn the Qur'an and read the Qur'an at the time of maghrib and make the religious community and to get used to reading the Qur'an and had a strong religious character in Kampar regency.

From the analysis it was concluded that the Regional Regulation No. 2 of 2013 which is concerning about the Qur'an categorized Maghrib Society Movement has not been successful. This is evident from not achieving the desired goals and objectives of Regulation No. 2 of 2013. As to enable Muslims to learn and read the Qur'an in maghrib time and make the religious community and to get used to reading the Qur'an and has a strong religious character in Kampar regency. Found factors that affect the evaluation of the policy, namely: the availability of faculty and community participation.

Keywords : Evaluation, Community Movement Maghrib Qur'an

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, membaca merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dan dapat dikatakan bahwa semua proses belajar diawali dari hal membaca. Dengan membaca, manusia dapat mengetahui apa yang belum diketahuinya dan mendapatkan ilmu baik pengetahuan umum atau pun pengetahuan agama. Dengan kata lain membaca berarti berbuat atau melakukan sesuatu pekerjaan atau kegiatan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan atau informasi yang berbentuk teks atau tulisan.

Mengaji merupakan salah satu aktifitas ibadah yang sangat lekat dengan masyarakat muslim di Indonesia sejak mula berkembangnya islam. Sejumlah rumah ibadah seperti surau, mushalla, langgar, masjid dan lain-lain senantiasa diramaikan dengan kegiatan mengaji, khususnya di waktu sore usai salat Ashar maupun ba'daa Maghrib. Bagi kaum muslim di Indonesia mengaji tidak ubahnya lembaga pendidikan keagamaan nonformal bagi semua anak didik. Namun kini, seiring dengan semakin berkembangnya kemajuan zaman, kegiatan anak-anak mulai mengalami pergeseran dari surau, mushalla, langgar dan masjid bergeser keruang keluarga dengan menonton acara-acara televisi atau mereka beralih kewarung-warung internet maupun warung game 24 jam waktunya seolah habis untuk menonton atau bermain di ruang maya tanpa makna. Mengaji yang biasa dilakukan sehabis sholat terutama se usai sholat maghrib tidak lagi menjadi kegiatan rutin yang membanggakan, melainkan sebaliknya, seolah menjadi hantu yang harus di hindari ‘anak-anak sudah menjauh dari Rumah Allah’

Arus perkembangan zaman dan perkembangan media masa elektronik pada saat ini telah melahirkan pergeseran nilai, budaya, kultur, dan tradisi masyarakat, baik di perkotaan dan lebih-lebih di perdesaan. Dan akibatnya telah melahirkan perubahan sosial yang sangat signifikan di tengah-tengah masyarakat, imbasnya tradisi baik pada kelompok masyarakat pada saat ini telah tergerus oleh asupan budaya dan nilai-nilai yang

berseberangan dengan kondisi dan tradisi masyarakat Indonesia termasuk budaya maghrib mengaji.

Untuk menjawab kondisi perubahan dan pergeseran tersebut, diperlukan upaya, solusi dan langkah-langkah konstruktif untuk menghidupkan dan mengembalikan kembali sebuah tradisi baik dan mengakar ditengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia, yaitu Melalui Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. upaya ini dilakukan untuk mengajak kembali masyarakat muslim Indonesia untuk kembali memakmurkan mushola, surau, langgar dan masjid.

Maka Pemerintah Kab.Kampar mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. Agar dikeluarkannya perda tersebut untuk memasyarakatkan gemar mengaji dan mengaktifkan masyarakat mengaji dan mempelajari Al-Qura'an. Adapun Tujuan diadakan perda ini adalah :

- a. Untuk dijadikan sebagai dasar dan sekaligus untuk hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kampar dan masyarakat dalam melaksanakan program Gemar Mengaji.
- b. Menciptakan masyarakat Kabupaten Kampar yang agamis dan memiliki moral dan akhlak yang mulia.
- c. Menjadikan masyarakat Kabupaten Kampar yang memiliki karakter keagamaan yang kuat.
- d. Mengaktifkan umat islam mempelajari dan membaca Al-Qur'an pada waktu maghrib di Kabupaten Kampar.
- e. Memahami pokok-pokok ajaran agama dan memberantas buta aksara Al-Qur'an.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari Peraturan Daerah ini adalah:

1. Sebagai acuan dari masyarakat Kabupaten Kampar untuk membaca

mencintai dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an, khususnya bagi anak didik dan peserta masyarakat Gemar Mengaji, agar dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

2. Dapat dijadikan pedoman bagi aparatur pemerintah daerah, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Sasaran Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji seluruh masyarakat yang beragama islam baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua adalah salah satu cara untuk dapat mengaktifkan masyarakat mengaji di waktu maghrib juga mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk akhlak dan moral yang berkualitas dan mencerminkan kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Tabel 1.1

Jumlah masjid dan musholla diseluruh Kabupaten Kampar Tahun 2015.

NO	KECAMATAN	MASJID	MUSHOLA	JUMLAH
1	BANGKINANG KOTA	32	14	46
2	BANGKINANG	29	35	64
3	KUOK	36	24	60
4	SALO	23	19	42
5	XII KOTO KAMPAR	25	56	81
6	TAPUNG	83	200	283
7	TAPUNG HULU	49	46	95
8	TAPUNG HILIR	41	84	125
9	KAMPAR	53	110	163
10	KAMPAR TIMUR	35	56	91
11	KAMPAR UTARA	28	43	71
12	RUMBIO JAYA	24	58	82
13	TAMBANG	64	59	123

14	SIAK HULU	61	71	132
15	KAMPAR KIRI	15	8	23
16	KAMPAR KIRI HILIR	14	18	32
17	KAMPAR KIRI TENGAH	29	51	80
18	PERHENTIAN RAJA	23	44	67
19	GUNUNG SAHILAN	21	43	64
20	KAMPAR KIRI HULU	30	30	60
JUMLAH		715	1069	1784

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar 2015.

Berdasarkan Dari data tabel diatas dapat dilihat berapa banyaknya jumlah keseluruhan masjid dan mushola di Kabupaten Kampar dan untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Kampar yang agamis dan memiliki moral dan akhlak mulia sehingga terlaksanakan program maghrib mengaji sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Perda No 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji dan Kecamatan Bangkinang Kota menjadi percontohan bagi Kecamatan lainnya di Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.

Dalam pelaksanaan program maghrib mengaji Pemerintah daerah memberikan pembinaan umum kepada penyelenggara Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar bersama Markaz Islamy Kabupaten Kampar melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. tenaga pengajar kegiatan Maghrib Mengaji mempunyai kewajiban diantaranya : a.) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. b.) Meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. c.) Menjaga marwah sesuai dengan amanah yang telah diberikan masyarakat d.) Menjadi tauladan yang baik bagi anak didik dan masyarakat. tenaga pengajar juga memiliki hak diantaranya: a.) Memperoleh penghasilan tetap dari pemerintah, pemerintah Daerah, Masjid, Mushola, Langgar dan Surau sesuai dengan kemampuan. b.) Mendapatkan

pembinaan dari pemerintah daerah melalui markaz islamy kabupaten kampar dan kementerian agama kabupaten kampar.

Dan untuk suksesnya kegiatan maghrib mengaji pemerintah kabupaten kampar membentuk tim motivator, tim motivator terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Markaz Islamy dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Biaya pelaksanaan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pembiayaan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di antaranya: a. Biaya operasional masyarakat Maghrib Mengaji b. Intensif tenaga pendidik/pengajar masyarakat Maghrib Mengaji c. Biaya sarana dan prasarana kegiatan masyarakat Maghrib Mengaji d. Dan lain-lain.

Dari pengamatan penulis di Kecamatan Bangkinang Kota penulis melihat dari awal perda GEMAR MENGAJI terbentuk pada tahun 2013 kegiatan GEMAR MENGAJI terlaksana di seluruh mesjid atau mushola di Kecamatan Bangkinang Kota. Namun penulis menemukan kegiatan gerakan masyarakat maghrib mengaji tidak terlaksana dengan efektif penemuan peneliti meliputi sudah berkurangnya mesjid atau mushola yang melaksanakan kegiatan gerakan masyarakat maghrib mengaji sehabis sholat maghrib di Kecamatan Bangkinang Kota .

Kecamatan Bangkinang kota memiliki 32 mesjid dan 14 mushola 46 total keseluruhan tempat pelaksanaan kegiatan gerakan masyarakat maghrib mengaji . Dari observasi lapangan penulis mengambil 2 dari 46 sarana pelaksanaan kegiatan program GEMAR MENGAJI yang masih melaksanakan program dan tidak yang melaksanakan program GEMAR MENGAJI.

Masjid yang masih melaksanakan program GEMAR MENGAJI yakni Islamic

Centre Bangkinang Kota dari hasil wawancara kepada tim pengajar program GEMAR MENGAJI “ program GEMAR MENGAJI di islamic centre masih berjalan di karenakan islamic centre masih memiliki banyak tim pengajar dan masyarakat atau anak-anak yang mengikuti program GEMAR MENGAJI memilih islamic centre sebagai tempat favorite untuk mengaji karena selain sarana prasarana yang lengkap juga tim pengajar yang memadai”. Dan mesjid yang sudah tidak melaksanakan program GEMAR MENGAJI diantaranya mesjid Al-Hidayah Bangkinang kota dari pengamatan penulis dan wawancara dengan pengurus mesjid kegiatan GEMAR MENGAJI tidak dilaksanakan karena tim tenaga pengajar program GEMAR MENGAJI tidak ada dan lagi pula masyarakat atau anak-anak sekitar yang mengikuti program GEMAR MENGAJI lebih memilih islamic centre sebagai tempat favorite mereka melaksanakan program GEMAR MENGAJI” .

Atas dasar pemikiran yang dimaksud dan dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki daerah, maka Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, melakukan pengaturan , serta pengawasan dalam program Pandai Membaca Al-Qur’an.

Sebagaimana fenomena yang terlihat maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

”Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Kampar”

Konsep teori

1. Kebijakan Publik

Suatu kegiatan evaluasi tidak lepas dari suatu kebijakan yang telah dirancangan dengan sengaja guna mencapai suatu tujuan atau sebagai pemecahan dari suatu masalah yang dihadapi. Pada dasarnya ada perbedaan antara konsep ‘kebijakan’ dan ‘kebijaksanaan’. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip

tertentu. Sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dan lain-lain.

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbalik. Sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu. Kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan karena alasan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Dengan perbedaan implementasi di atas, makanya seharusnya dalam implementasinya juga harus berbeda.

Young dan Quinn dalam Suharto (2008:44) menjelaskan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, yaitu:

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal. Melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik

berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas, yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain: Kepres, Impres, Kepmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lain-lain. Rangkaian kebijakan diatas mengadaptasikan mekanisme yang lazim didalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Pada prinsipnya tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan dari intervensi itu sendiri. Kebijakan dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana (**Nugroho, 2004:159**).

Kebijakan publik memiliki tiga proses pokok, yaitu: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

2. Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya.

Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan demikian evaluasi kebijakan ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

William N. Dunn (2013:608-609) menerangkan gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat *evaluatif*. Pada tahap ini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta (Apakah sesuatu ada?) atau aksi (Apakah yang harus dilakukan?) tetapi nilai (Berapa nilainya?). Oleh karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode – metode analisis kebijakan lainnya. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Fokus Nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Oleh karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, maka evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan – tujuan dan sasaran itu sendiri.
- b. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung pada “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah, diperlukan tidak hanya bahwa hasil – hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan yang demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil – hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi – aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena

itu, pementauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

- c. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan *evaluatif* berbeda dengan tuntutan – tuntutan *advokatif*, karena lebih diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu daripada hasil di masa depan. Evaluasi bersifat *retrospektif* dan setelah aksi – aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis – premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).
- d. *Dualitas Nilai*. Nilai – nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh mana berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hak itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai – nilai sering ditata di dalam suatu hierarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antara tujuan dan sasaran. Menurut **Dunn (2013:609)** evaluasi berfungsi sebagai berikut:
 - a. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
 - b. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
 - c. Evaluasi memberikan sumbangan aplikasi metode-metode analisis kebijakan lain termasuk perumusan masalah dan rekomendasi, informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan.
 - d. Evaluasi dapat menyumbangkan pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternative kebijakan yang diunggulkan dan target perlu didefinisikan ulang. Secara konseptual ada pandangan yang menyatakan bahwa evaluasi dapat dilakukan pada seluruh periode kegiatan, artinya dapat dilakukan pada saat kegiatan belum dilaksanakan,

evaluasi pada saat kegiatan berjalan, dan setelah kegiatan dilaksanakan (Riyadi, 2003:268).

Menurut Dunn (2013:608) evaluasi mengandung arti produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini berarti hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran. Sejujurnya Dunn mengatakan diperlukan seperangkat prosedur yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang akan dievaluasi, yaitu dengan membuat daftar yang melingkupi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. *Input* (masukan) adalah masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan untuk itu dikembangkan instrumen yang meliputi indikator:
 1. Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana, dan prasarana)
 2. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan dan teknologi)
- b. Proses adalah bagaimana sebuah kebijakan di transformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat untuk itu dikembangkan instrumen yang meliputi indikator:
 1. Tepat sasaran atau tidak
 2. Tepat guna atau tidak
 3. Efisien atau tidak
- c. *Output* (keluaran) merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan, apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan yang menjadi indikatornya adalah:
 1. Tepat tidak sasaran yang dituju
 2. Berapa besaran tercover
 3. Seberapa banyak sasaran yang tertangani
 4. Seberapa besar kelompok sasaran yang terlibat
- d. Sedangkan dampak adalah apakah suatu pelaksanaan kebijakan yang berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan, untuk itu dikembangkan instrumen yang meliputi indikator:
 1. Ada tidaknya perubahan pada target/sasaran

2. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran
3. Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran

Dunn menggambarkan kriteria-kriteria kinerja kebijakan yang harus dievaluasi adalah sebagaimana yang tampak di dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Kriteria Evaluasi

Kategori	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Cost-benefit Ratio; Manfaat bersih; Unit biaya
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah?	Biaya tetap, Efektifitas tetap
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Criteria Pareto; Kriteria Kaldor Hicks; Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan	Konsistensi

	memuaskan kebutuhan/pr eferensi atau nilai- nilai kelompok tertentu?	dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: Willian N. Dunn (2013:610)

Berikut adalah kriteria evaluasi menurut Dunn:

a. Efektivitas

Yang dimaksud efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik. Agar masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat dapat diatasi dengan baik. Dengan demikian efektivitas dari sebuah kebijakan yang berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan dari sebuah kebijakan telah tercapai. Indikator dari efektivitas dapat dilihat dari:

1. Tujuan dari sebuah kebijakan
2. Sasaran dari sebuah kebijakan

b. Efisiensi

Yang dimaksud efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Dimana didalam efisiensi dari sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan suatu kebijakan. Untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengimplementasian kebijakan. Untuk efisiensi kebijakan tersebut dapat diukur dengan indikator:

1. Dari segi biaya
2. Dari segi waktu
3. Dari segi tenaga

c. Kecukupan

Yang dimaksud kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dimana dalam suatu kebijakan terdapat alternatif apa yang akan dilakukan bila kebijakan telah diimplementasikan. Dengan kata lain seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah. Indikator penilainya adalah:

1. Pelaksana kebijakan
2. Pengawasan yang dilakukan

d. Pemerataan (equity)

Yang dimaksud pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Yang dilihat dari pemerataan adalah apakah manfaat distribusi merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda, dimana ada 3 unsur kelompok dari kebijakan yang harus diperhatikan yaitu :

1. Kelompok pemerintah sebagai pembuat kebijakan
2. Kelompok swasta sebagai objek kebijakan
3. Kelompok masyarakat sebagai impact dari kebijakan

e. Responsivitas

Yang dimaksud responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Kebijakan ingin melihat bagaimanakah tanggapan dari masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakan. Indikatornya adalah respon masyarakat terhadap kebijakan.

f. Ketepatan

Yang dimaksud ketepatan adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah adanya antara tujuan dan hasil yang diperoleh, benar-benar bernilai/bermanfaat. Dengan kata lain apakah kebijakan yang ada benar-benar berguna atau bernilai. Untuk ketepatan alternatif yang digunakan dapat

diukur dengan indikator: ketepatan dari produk kebijakan.

Mengevaluasi kebijakan atau program yang ada saat ini dapat mengarah pada perbaikan-perbaikan. Mengevaluasi kebijakan saat ini yang berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam sebuah proses atau kebijakan publik. Menganalisa kelebihan dan kekurangan kebijakan sosial yang sedang beroperasi harus dipertahankan, diperkuat, dan diubah. Jika kebijakan atau program yang ada dipandang efektif secara menyeluruh, maka kebijakan tersebut perlu diganti secara total pula (Suharto, 2005:113).

Untuk mengumpulkan data dan informasi maka penulis menggunakan data primer dan data sekunder maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari informan dilapangan yang menjadi objek penelitian. Data yang dibutuhkan dari informan antara lain meliputi informasi baik melalui catatan tertulis maupun melalui wawancara.

1. Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan masalah penelitian evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Kampar khususnya tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji di Kecamatan Bangkinang Kota.
2. Melalui observasi lapangan yang dilakukan pada Kecamatan Bangkinang Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dalam penelitian ini, meliputi:

1. Adalah data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas penelitian yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar)

untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti data mesjid melaksanakan program gerakan masyarakat maghrib mengaji. Selain itu, penulis juga mendapatkan data berupa jurnal, skripsi, tulisan-tulisan seputar masalah penelitian dari media-media lokal maupun nasional seperti dan sumber-sumber lainnya dari internet

2. Data lain yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung pada objek penelitian dan mencatat beberapa hal – hal penting yang berhubungan dengan penelitian.

Tujuan observasi adalah untuk mengecek atau memastikan sendiri sampai dimana kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan.

2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan seperlunya yang dipandang penting dengan jalan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berikut adalah kriteria evaluasi menurut Dunn:

a. Efektivitas

Yang dimaksud efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik. Agar masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat dapat diatasi

dengan baik. Dengan demikian efektivitas dari sebuah kebijakan yang berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan dari sebuah kebijakan telah tercapai. Indikator dari efektivitas dapat dilihat dari:

1. Tujuan dari sebuah kebijakan
2. Sasaran dari sebuah kebijakan

Sasaran seluruh masyarakat Kabupaten Kampar beragama islam.

b. Efisiensi

Yang dimaksud efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Dimana didalam efisiensi dari sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan suatu kebijakan. Untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengimplementasian kebijakan. Untuk efisiensi kebijakan tersebut dapat diukur dengan indikator:

1. Dari segi biaya
2. Dari segi waktu
3. Dari segi tenaga

Termasuk didalamnya dari segi ketersediaan tenaga pengajar dalam melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji

c. Kecukupan

Yang dimaksud kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dimana dalam suatu kebijakan terdapat alternatif apa yang akan dilakukan bila kebijakan telah diimplementasikan. Dengan kata lain seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah. Indikator penilainya adalah:

1. Pelaksana kebijakan
2. Pengawasan yang dilakukan

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk berjalannya

kegiatan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji

d. Pemerataan (equity)

Yang dimaksud pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Yang dilihat dari pemerataan adalah apakah manfaat distribusi merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda, dimana ada 3 unsur kelompok dari kebijakan yang harus diperhatikan yaitu :

1. Kelompok pemerintah sebagai pembuat kebijakan
2. Kelompok swasta sebagai objek kebijakan
3. Kelompok masyarakat sebagai impact dari kebijakan

Masyarakat yang mendapatkan kebijakan Gerakan Masyarakat Maghrib mengaji

e. Responsivitas

Yang dimaksud responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Kebijakan ingin melihat bagaimanakah tanggapan dari masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakan. Indikatornya adalah respon masyarakat terhadap kebijakan.

Respon masyarakat terhadap kebijakan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.

f. Ketepatan

Yang dimaksud ketepatan adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah adanya antara tujuan dan hasil yang diperoleh, benar-benar bernilai / bermanfaat. Dengan kata lain apakah kebijakan yang ada benar-benar berguna atau bernilai. Untuk ketepatan alternatif yang digunakan dapat

diukur dengan indikator: ketepatan dari produk kebijakan.

Mengevaluasi kebijakan atau program yang ada saat ini dapat mengarah pada perbaikan-perbaikan. Mengevaluasi kebijakan saat ini yang berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam sebuah proses atau kebijakan publik. Menganalisa kelebihan dan kekurangan kebijakan sosial yang sedang beroperasi harus dipertahankan, diperkuat, dan diubah. Jika kebijakan atau program yang ada dipandang efektif secara menyeluruh, maka kebijakan tersebut perlu diganti secara total pula (**Suharto, 2005:113**).

Cara mengevaluasi kebijakan yang ada menurut **Suharto (2005:113)** yaitu:

- a. Nyatakan suatu kebijakan atau program ditujukan untuk suatu masalah sosial dalam kehidupan masyarakat.
- b. Apa kelebihan kebijakan ini (perhatikan efektivitas, biaya, penegakan, dan penerimaan publik).
- c. Apa kekurangan kebijakan ini (perhatikan efektivitas, biaya, penegakan, dan penerimaan publik).
- d. Berdasarkan evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan kebijakan yang ada, haruskah kebijakan tersebut secara total diganti, diperkuat atau diperbaiki.

Suchman dalam **Winarno (2002:169–170)** mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni :

- a) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b) Analisis terhadap masalah
- c) Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- d) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
- e) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain
- f) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Selain itu, **Suchman** juga mengidentifikasi beberapa pertanyaan operasional untuk menjalankan riset evaluasi, yaitu: *Pertama*, apakah yang menjadi isi dari

tujuan program? *Kedua*, siapa yang menjadi target program? *Ketiga*, kapan perubahan yang diharapkan terjadi? *Keempat*, apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak (*unitary or multiple*)? *Kelima*, apakah dampak yang diharapkan besar? *Keenam*, bagaimanakah tujuan – tujuan tersebut dicapai?.

Menurut **Suchman**, dari keseluruhan tahapan tersebut yang paling penting dalam suatu evaluasi kebijakan adalah tahap mendefinisikan masalah. Hal ini karena hanya setelah masalah – masalah didefinisikan dengan jelas, maka tujuan – tujuan dapat disusun dengan jelas pula. Kegagalan dalam mendefinisikan masalah akan berakibat pada kegagalan dalam memutuskan tujuan – tujuan.

Dari keseluruhan teori evaluasi yang diungkapkan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya evaluasi merupakan sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu dalam hal pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. hal ini karena dalam evaluasi dilakukan penilaian terhadap kesesuaian antara kinerja kebijakan dengan hasil yang telah ditetapkan, sehingga setelah dilakukan evaluasi sebuah kebijakan, diharapkan akan tercipta sebuah kebijakan yang lebih baik lagi kedepannya dengan mempelajari hal – hal yang dianggap menjadi kekurangan pada kebijakan sebelumnya setelah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

B. Faktor yang mempengaruhi pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan oleh dinas Bina Marga Kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentu akan mengalami berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi. Faktor-faktor penghambat timbul dalam proses pengawasan yang dilaksanakan. Faktor penghambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Munculnya masalah-masalah yang dapat menghambat proses pengawasan tersebut dapat

bersumber pada internal, yang melakukan pengawasan dan yang diawasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari pengawasan antara lain sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat

Efektivitas partisipasi pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang bersifat relatif. Setiap pihak dapat saja memiliki pandangan yang berbeda tentang sampai sejauh mana gerakan masyarakat maghrib mengaji berjalan dengan baik. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam melakukan mengajak anak untuk membaca Al-Quran, Karena partisipasi masyarakat juga penting, maka masyarakat juga harus menaati aturan atau sanksi yang jelas sudah ada di dalam aturan tersebut.

Masyarakat merupakan faktor pertama yang mempengaruhi penghambatan pelaksanaan Peraturan daerah No 2 Tahun 2013 Tentang gerakan masyarakat magrib mengaji di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, artinya dilihat dari segi pengetahuan, kemampuan dan keahliannya dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut, karena pengetahuan adalah modal pertama dalam Peraturan daerah No 2 Tahun 2013 Tentang gerakan msayrakat maghrib mengaji di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

2. Ketersediaan Tenaga Pengajar

Faktor tenaga pengajar dan dana insentif dalam melaksanakan kebijakan gerakan masyarakat maghrib mengaji sangat berperan dalam kelancaran proses pelaksanaan kegiatan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai dengan maksimal dan sesuai dengan yang

diinginkan. Anggaran yang digunakan untuk kelancaran kegiatan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji adalah anggaran operasional. Anggaran operasional adalah biaya dalam merencanakannya kebutuhan, anggaran operasional ini adalah untuk biaya intensif tenaga pengajar Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji di Kabupaten Kampar, maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator yang digunakan, adalah sebagai berikut :

1. Kondisi tenaga pengajar Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji tidak memadai, dikarenakan tidak adanya insentif yang jelas yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga pengajar keseluruhannya. Efektifitas tidak tercapai, mengingat tidak berjalannya kegiatan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di keseluruhan mesjid, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan tidak tercapai yakni mengaktifkan masyarakat mengaji di waktu maghrib. Selain itu, kriteria efisiensi juga tidak tercapai, melihat sumber daya manusia yang berpartisipasi terhadap kegiatan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji serta ketersediaan insentif bagi tenaga pengajar masih kurang, sehingga mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Gearakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Kampar. Kemudian kriteria kecukupan juga tidak terpenuhi karena dalam pelaksanaan kebijakan yang bertanggung jawab seharusnya Pemerintah Daerah tetapi, di lapangan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di laksanakan oleh pihak ketiga sehingga kegiatan

Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji sulit di kontrol. Kriteria pemerataan (*equity*) dan responsivitas tidak terpenuhi karena distribusi manfaat dari adanya kebijakan ini juga belum merata kepada ketiga kelompok kebijakan. Masyarakat belum mengerti dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk kriteria ketepatan juga tidak terpenuhi karena kebijakan ini sulit untuk mengontrol masyarakat yang akan mengaji di waktu maghrib.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji adalah ketersediaan tenaga pengajar yang tidak memadai atau kurang dan partisipasi masyarakat yang kurang antusias dalam kegiatan ini menjadi kendala dalam pelaksanaan gerakan masyarakat maghrib mengaji. Sasaran kebijakan ini adalah masyarakat tetapi masyarakat sendiri juga tidak sepenuhnya mengetahui tujuan dari kegiatan ini. Tidak hanya itu insentif juga menjadi hambatan dalam menjalankan kebijakan ini. Insentif yang seharusnya diterima oleh tenaga pengajar tidak keseluruhannya diberikan oleh pemerintah dikarenakan tidak ada anggaran khusus dan terikat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi kembali Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Kampar. Agar pada masa yang akan datang kegiatan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji menjadi lebih baik lagi. Supaya masyarakat memahami secara jelas hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Kampar.

2. Pemerintah Kabupaten Kampar seharusnya menyiapkan insentif yang jelas

dalam APBD Kabupaten Kampar agar pembayaran insentif kepada tenaga pengajar jelas dan dapat diberikan rutin setiap bulannya agar tenaga pengajar mendapatkan hak dan kewajibannya menjalankan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S & Jabar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI . 2014, *Pedoman Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji*, Jakarta : Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- Dunn N, Willian. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Edisi Revisi. Bandung: PT Rosdakarya.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nogi Tangkilisan, Hessel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- _____. 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant D. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- _____. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Yusuf, Tayibnapi Farida. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi. Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Karya Ilmiah :

Nurhasni, Yuke. 2015. Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Parkir Pada Badan Jalan). Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Riau, Pekanbaru.

Dokumen :

Peraturan Bupati Kampar No.7 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Kampar

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Kampar